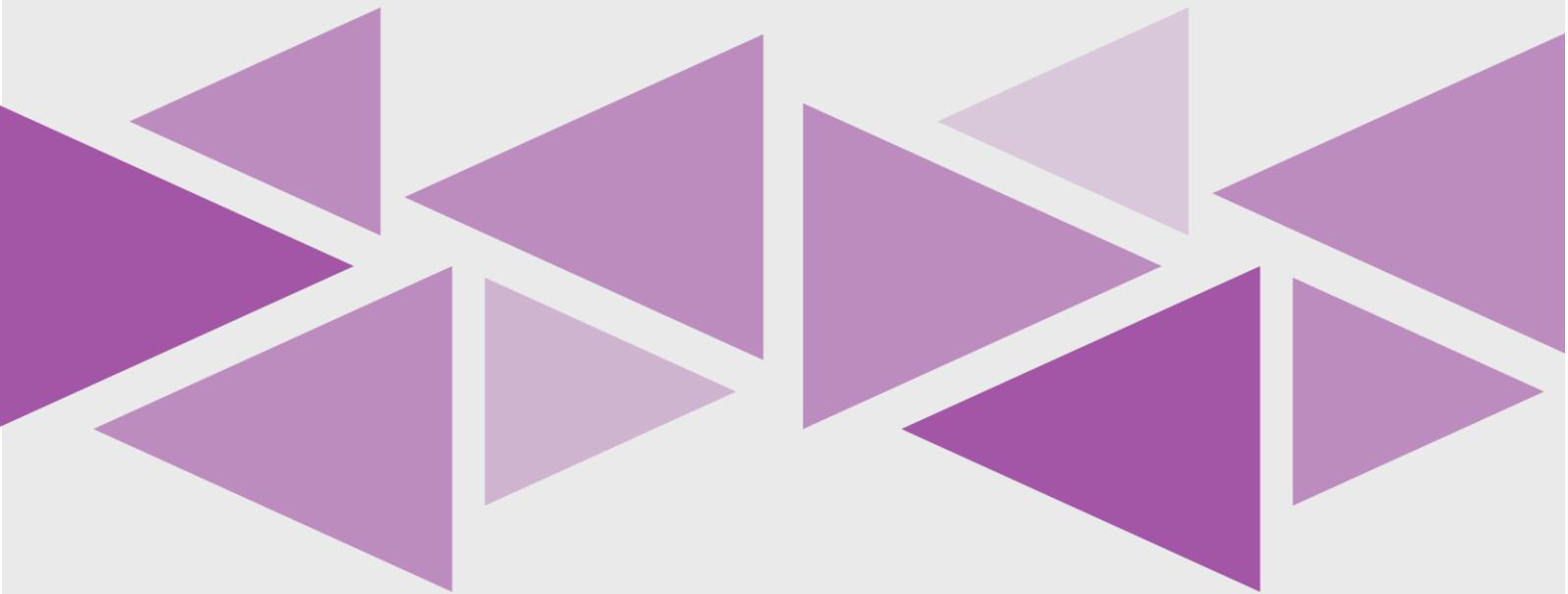




2024

Rencana Aksi Kinerja



**DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA**

KATA PENGANTAR

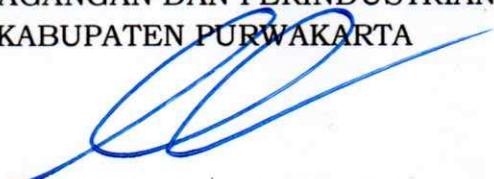
Puji Syukur dipanjatkan ke Hadapan Tuhan Yang Maha Esa yg telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dapat menyusun Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024.

Dokumen Rencana Aksi Capaian Kinerja disusun sebagai dasar untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Aksi Capaian Kinerja ini dapat dijadikan pedoman terkait pelaksanaan program, kegiatan/sub kegiatan sesuai perjanjian kinerja pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta tahun 2024

Purwakarta, 04 Januari 2024

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA


EKA SUGRIYANA, SP. MM

Pembina Tk.I

NIP. 19700407 199803 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas dan Fungsi.....	2
1.3. Struktur Organisasi.....	3
1.4. Sumber Daya Manusia.....	6
1.5. Dasar Hukum Penyusunan Rencana Aksi	7
1.6. Maksud dan Tujuan.....	8
1.7. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis	10
2.2. Indikator Kinerja Utama.....	11
2.3. Perjanjian Kinerja.....	13
2.4. Rencana Aksi Kinerja.....	16

BAB III PENUTUP..... 26

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta sebagai Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta memiliki kewajiban untuk melaksanakan manajemen pengelolaan kinerja, meliputi: komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

Pemerintahan yang akuntabel merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, aspirasi dan cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel serta bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam siklus manajemen pengelolaan kinerja, dimana komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi harus saling terkait, berkesinambungan dan dapat dijalankan dengan efisien dan efektif. Komponen perencanaan dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah menyusun Rencana Aksi Capaian Kinerja sebagai tindaklanjut dari ditetapkannya dokumen Perjanjian Kinerja. Rencana aksi pencapaian kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta tahun 2024 ini memiliki peran yang sangat penting sebagai panduan dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang terkait langsung dengan perjanjian kinerja tahun 2024.

1.2. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan 241 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten purwakarta Nomor 113 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha, Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai mana

tersebut di atas, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
4. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 42 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 241 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

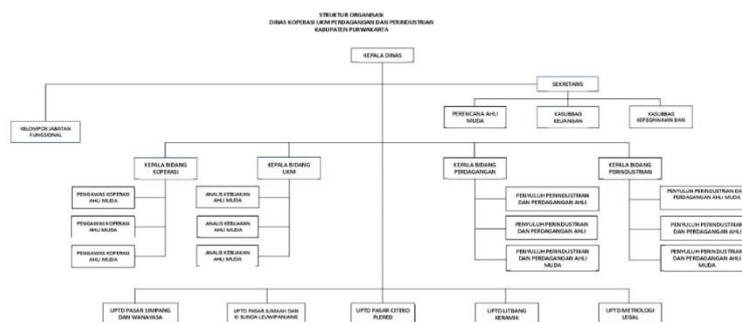
Susunan organisasi Dinas koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekertaris, terdiri atas :
 1. Sub bagian keuangan
 2. Sub bagian Kepegawaian dan Umum
 3. Perencana Ahli Muda
- c. Bidang Koperasi, terdiri atas :
 1. Pengawas Koperasi Ahli Muda
 2. Pengawas Koperasi Ahli Muda
 3. Pengawas Koperasi Ahli Muda
- d. Bidang Usaha Kecil Menengah terdiri atas :
 1. Analis Kebijakan Ahli Muda
 2. Analis Kebijakan Ahli Muda; dan
 3. Analis Kebijakan Ahli Muda
- e. Bidang Perdagangan, terdiri atas ;
 1. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda
 2. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda; dan
 3. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda.
- f. Bidang Perindustrian, terdiri atas ;

1. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda;
 2. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda; dan
 3. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri atas;
1. UPTD. Pasar Juma'ah dan Pasar Ki Sunda Leuwipanjang
 2. UPTD. Pasar Simpang dan Pasar Wanayasa
 3. UPTD. Pasar Citeko Plered;
 4. UPTD Metrologi Legal dan
 5. UPTD Pengembangan Sentra Keramik;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dapat di lihat pada bagan struktur organisasi berikut ini :

Bagan Struktur Organisasi



1.4. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Koperasi ,Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta setelah di berlakukannya Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 42 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 241 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta adalah sebanyak 116 orang, yang susunannya terinci sebagai berikut :

a. Susunan Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Uraian	Jumlah
1	Pejabat Struktural	49
2	Jabatan Fungsional	17
3	Non PNS	50

b. Susunan Pegawai Berdasarkan Bagian, Bidang dan UPTD

No	Uraian	Jumlah
1	Sekretariat	30
2	Bidang Koperasi	5
3	Bidang UKM	6
4	Bidang Perdagangan	11
5	Bidang Perindustrian	6

6	UPTD Pasar Leuwipanjang	18
7	UPTD Pasar Simpang dan Pasar Wanayasa	9
8	UPTD Pasar Citeko	13
9	UPTD Metrologi Legal	10
10	UPTD Pengembangan Sentra Keramik	8

c. Susunan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Jumlah
1	Sarjana Strata 2	7
2	Sarjana Strata 1	33
3	Diploma 3	5
4	SMA/SMK	67
5	SMP	-
6	SD	4

d. Susunan Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Jumlah
1	Golongan IV	6
2	Golongan III	35
3	Golongan II	21
4	Golongan I	4
5	PPPK	1
6	Non PNS	50

1.5. Dasar Hukum Penyusunan Rencana Aksi

Dasar hukum penyusunan rencana aksi kinerja, sebagai berikut

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja ;

1.6. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan laporan rencana aksi adalah tersusunnya rencana aksi Tahun 2024, dan tujuan disusunnya rencana aksi yaitu :

- a. Untuk merencanakan pencapaian target kinerja Tahun 2024 secara berkala;
- b. Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran strategis dan IKU dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
- c. Untuk memudahkan dalam monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja pada Tahun 2024;
- d. Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi ,UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Purwakarta menuju terwujudnya good governance, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat.

1.7. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan Rencana Aksi Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 terdiri dari :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tugas dan Fungsi
- 1.3 Struktur Organisasi
- 1.4 Sumber Daya Manusia
- 1.5 Dasar Hukum Penyusunan Rencana Aksi
- 1.6 Maksud dan Tujuan
- 1.7 Sistematika Penulisan

BAB II Perencanaan

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Indikator Kinerja Utama
- 2.3 Perjanjian Kinerja
- 2.4 Rencana Aksi

BAB III Penutup

BAB II

PERENCANAAN DAN POHON KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, yaitu: “ Purwakarta Cerdas, Sehat dan Berakhlakul Karimah”. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta mengemban Misi ke 3 “ Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal .

Untuk menyelenggarakan misi tersebut, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta menetapkan tujuan untuk misi tersebut, yaitu:

1. Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral

dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta menetapkan sasaran perangkat daerah dalam rangka mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
2. Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan dan Perindustrian
3. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (OutPut) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara mendalam untuk mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta yang akan digunakan untuk periode tahun 2024-2026 sesuai periode Renstra telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala. Adapun Indikator kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta seperti berikut

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Purwakarta Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke Tahun			Kondisi Akhir
			2024	2025	2026	
Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Pertumbuhan Ekonomi	3,2	3,1	3,01	9.31
		Persentase Koperasi Aktif	89,7	89,8	90,05	269.55
		Pertumbuhan UMKM	81,52	85,09	88,67	39.71
	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan dan Perindustrian	Inflasi	1,34	1,25	1,16	3.75
		Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB	81,52	85,09	88,67	255.28
		Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	46.782.449.072	47.737.192.933	48.711.421.360	143.231.063.365
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik

2.3. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa Pejabat Eselon II dan Kepala Unit Operasional wajib menyampaikan Perjanjian Kinerja, yang merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian, Perjanjian Kinerja (PK) ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi dan penilaian kinerja. Dengan Perjanjian Kinerja (PK), diharapkan para pimpinan instansi harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat. Perjanjian Kinerja (PK) sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun

manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II, sehingga wajib untuk menyampaikan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang telah dirancang pada tahun berkenaan. Setiap akhir periode tahunan, dokumen Perjanjian Kinerja ini dipakai sebagai acuan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Pertumbuhan Ekonomi	3,2	
		Persentase Koperasi Aktif	89,7	
		Pertumbuhan UMKM	81,52	

	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan dan Perindustrian	Inflasi	1,34	
		Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB	81,52	
		Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	46.782.449.072	
	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	

PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	50.000.000
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	125.000.000
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	200.000.000
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	200.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.060.882.816
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	611.579.090
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	109.994.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	20.000.000
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	289.539.600
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	188.890.000
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	275.000.000
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	90.000.000
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	949.953.000
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	49.974.000
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	149.986.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.756.087.972

2.4. Rencana Aksi

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 yang dituangkan secara berkala (triwulan). Adapun Rencana Aksi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
RENCANA AKSI
DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. PURWAKARTA
TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target Triwulan				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Jadwal Pelaksanaan Triwulan			
			I	II	III	IV						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	√	√	√	√	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Capaian SAKIP Perangkat Daerah	14.756.087.972				
		Indeks Kepuasan Masyarakat													
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	179.322.100											
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	77.277.300	√	√				√		√			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.311.700	√										
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.069.100						√					
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.198.100	√										
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5.007.900						√					
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52.561.000	√												
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.897.000	√	√	√	√									

								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	170.804.000	√	√	√	√
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	49.993.000		√		
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	700.000.000	√	√	√	√
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	50.000.000	√		√	
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	√	√	√	√
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	√	√	√	
								Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.890.000	√			
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	236.832.000				
								Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	103.192.000	√			
								Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	133.640.000	√			
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang/Operasional Dinas Yang Dilaksanakan	1.790.663.696				
								Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	√	√		
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	249.984.528	√	√	√	√
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.535.679.168	√	√	√	√
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	831.741.000				
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	80.000.000	√	√		
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56.350.000	√	√	√	
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24.550.000	√	√	√	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	670.841.000	√			

2	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	√	√	√	√	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		50.000.000					
							Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota]		Jumlah ijin usaha koperasi simpan pinjam kewenangan kabupaten yang diterbitkan	50.000.000				
								Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	√	√		√
							PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			125.000.000				
							Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah koperasi yang diperiksa dan di awasi	125.000.000				
								Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	125.000.000	√		√	√
							PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Jumlah Koperasi Yang Dinilai Kesehatan	200.000.000				
							Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam yang di nilai kesehatannya	200.000.000				
								Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	200.000.000		√	√	
							PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	200.000.000				
							Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	200.000.000				
								Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	200.000.000	√	√	√	

3	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Pertumbuhan UMKM	√	√	√	√	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		1.060.882.816				
							Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah fasilitasi UKM dalam pemberdayaan	1.060.882.816				
							Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	68.036.000	√	√		
							Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinann	270.270.400	√	√	√	
							Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap UsahaMikro	599.992.300		√	√	√
							Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas danKompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	72.281.500			√	
							Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	50.302.616	√			
							PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		611.579.090				
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	611.579.090											
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, sertaDesain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan,Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	611.579.090	√		√	√							

4	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan dan Perindustrian	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	√	√	√	√	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Terfasilitasinya Rekomendasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	109.994.000				
							Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	15.000.000				
							Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15.000.000	√	√	√	
							Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	15.000.000				
							Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Data Tanda Daftar Gudang	15.000.000		√	√	√
							Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STWP) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	29.998.000				
							Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	15.000.000		√	√	
							Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	14.998.000				
							Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STWP) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	29.996.000				
							Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	14.998.000	√			
Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	14.998.000											

5	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan dan Perindustrian	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	√	√	√	√	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		949.953.000					
							Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	949.953.000					
							Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	150.000.000		√		√	
							Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	149.971.000	√		√		
							Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	649.982.000	√		√		√
							PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		49.974.000					
							Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	49.974.000					
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	49.974.000	√			√	
							PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		149.986.000					
							Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	149.986.000					
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	149.986.000				√								
Jumlah								19.076.885.878						

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Kinerja merupakan dokumen yang berisikan jadwal rencana pelaksanaan perjanjian kinerja yang menyangkut sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator dan target yang ditetapkan sesuai anggaran yang telah disetujui.

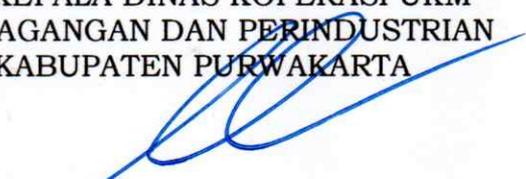
Rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2024 ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan karena fungsinya sebagai panduan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait langsung dengan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, serta sebagai tolok ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian kinerja sangat tergantung dari tingkat kematangan dalam penyusunan perencanaan. Perencanaan yang baik dapat dilihat dari alternatif terhadap langkah-langkah pelaksanaan kegiatan serta dapat mengantisipasi adanya permasalahan/ faktor penghambat yang timbul. Dengan tersusunnya rencana aksi pencapaian kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-

benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

Purwakarta, 04 Januari 2024

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA



EKA SUGRIYANA, SP, MM
Pembina Tk.I
NIP.19700407 199803 1 008